

**HUBUNGAN PENGUASAAN LAHAN DAN PENDAPATAN
RUMAHTANGGA DI PEDESAAN
(Kasus di Propinsi Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat)**

SUPRIYATI, SAPTANA DAN YANA SUPRIYATNA
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor

ABSTRACT

Historically correlation between landowner and land holding structure with household income structure in the rural area is linearity. Land owner or land holding structure inequality main factors to cause income structure inequality. In condition, there are the opportunity employ and economic activity to open up, why is the correlation between landowner and land holding structure with the income structure? This paper objective to study: (1) Land owner or land holding structure in the rural area; (2) Household income structure in the rural area; and (3) The correlation between landowner and land holding structure with the household income structure in the rural area. Location on this study to focused in the three district in three provincial exes. Klaten, central Java; Pasaman, West Sumatera; and Landak, West Kalimantan. The study to analyze by descriptive, gini index, and correlation analyze. In general, land owner and land holding size in Klaten, central Java less than West Sumatera and West Kalimantan. Gini index analysis relatively to indicate high equality, except in Pasaman, West Sumatera. Inequality on land holding lower than landowner in all location. Total income in Klaten, Central Java to range Rp. 6,77 - 6,97 million/years; Pasaman, West Sumatera to range Rp. 7,30 – Rp. 8,10 million/years; and in Landak, West Kalimantan to range Rp. 5,90 – 6,65 million/years. Analyze gini index for household income to indicate high inequality income structure rural area in Klaten. On the other hand, rural area in Pasaman, West Sumatera and Landak, West Kalimantan gini index result reflecting low inequality. There are deferent factors by location to cause inequality of landowner or land holding and household income structure, in Klaten rural area caused by high proportion income source from non-agriculture. On the other hand, in Pasaman and Landak rural area caused by level of technology adoption and kind of commodity planting by farmers. Statistically, correlation between landowner and land holding structure with household agriculture income is not significant. Correlation between total income with the landowner or land holding in Pasaman, West Java is significant, but in Klaten, Central Java and Landak, West Java is not significant.

Key word: Land, Owner, Holding, Inequality, Income

PENDAHULUAN

Penguasaan tanah merupakan tatanan dan prosedur yang mengatur hak dan kewajiban dari individu atau kelompok dalam penggunaan dan pengawasan atas tanah (Wiradi dalam Rachmat, M. 2000). Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UU No.5 tahun 1960), hak atas tanah yang diakui adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka hutan, hak memungut hasil hutan, serta hak yang sifatnya sementara seperti hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian. Dengan diundangkannya UUPA, beberapa bentuk penguasaan tanah tradisional diubah status hukumnya. Dalam praktek, di beberapa pedesaan perlakuan maupun istilah dalam penguasaan tanah tradisional masih banyak dipakai (Sumaryanto dan Rusastra, 2000).

Lebih lanjut Sumaryanto dan Rusastra (2000) menyatakan bahwa dalam studi-studi sosial ekonomi pertanian tentang masalah penguasaan tanah di pedesaan Indonesia dilakukan penyederhanaan dalam pengelompokan bentuk-bentuk penguasaan tanah ke dalam 2 kelompok besar yaitu: (1) Milik, dan (2) Bukan milik, yang terdiri dari sewa, bagi hasil, gadai dan lainnya. Meskipun pendekatan tersebut belum dapat menerangkan dengan baik eksistensi dan implikasi ekonomi dari sistem kelembagaan tanah adat, namun cukup baik untuk menjelaskan fenomena dinamika penguasaan tanah dan hubungannya dengan pendapatan dan kesempatan kerja di pedesaan.

Terdapat preposisi bahwa terjadi hubungan yang linier antara struktur penguasaan lahan dengan struktur pendapatan rumahtangga di pedesaan. Lebih lanjut banyak pula pakar sosial ekonomi pedesaan yang mengemukakan bahwa ketimpangan struktur penguasaan lahan telah menyebabkan ketimpangan struktur pendapatan, karena petani lahan luas berhasil melakukan akumulasi modal dan melakukan perluasan usaha baik pada usahatani maupun pada usaha nono pertanian. Pertanyaannya adalah dalam kondisi dewasa ini, dimana kesempatan kerja dan kesempatan berusaha mulai terbuka apakah masih menunjukkan dinamika pola hubungan yang sama, terdapat variasi, atau bahkan sudah mengalami pergeseran-pergeseran?. Kajian tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam baik melalui studi historis maupun kajian empiris di lapang. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji : (1) Struktur dan dinamika penguasaan lahan di pedesaan; (2) Struktur dan dinamika pendapatan rumahtangga di pedesaan; dan (3) Keterkaitan antara struktur penguasaan lahan dan pendapatan rumahtangga.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu: kabupaten Klaten (Jawa Tengah), kabupaten Pasaman (Sumatera Barat) dan kabupaten Landak (Kalimantan Barat). Pemilihan lokasi contoh didasarkan atas: (1) Kepadatan agraris; (2) Kesempatan kerja di luar sektor pertanian; dan (3) Kekhasan sosial budaya masyarakat terutama dalam kelembagaan penguasaan lahan. Kabupaten Klaten (Jawa Tengah) mewakili daerah yang kepadatan agrarisnya tinggi, kesempatan kerja di luar pertanian tinggi, dan sistem penguasaan lahan yang sangat dipengaruhi budaya Jawa. Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat) mewakili daerah yang kepadatan agrarisnya sedang, kesempatan kerja luar moderat dengan budaya merantau, dan sosial budaya masyarakatnya yang matrelinealistik dengan adanya tanah ulayat. Sementara itu, kabupaten Landak (Kalimantan Barat) mewakili daerah yang kepadatan agrarisnya rendah, kesempatan kerja di luar pertanian yang masih rendah, dan

karakteristik sosial budaya masyarakat yang belum sepenuhnya terbuka dengan kelembagaan penguasaan lahan didasarkan atas hukum adat.

Pada masing-masing kabupaten contoh ditentukan dua kecamatan contoh yang mewakili daerah lahan sawah dataran rendah dan lahan kering dataran tinggi. Perbedaan lokasi penelitian juga dapat dilakukan adanya perbedaan aksesibilitasnya. Pemilihan lokasi contoh dilakukan secara sengaja (*purposive*) pada daerah yang sesuai untuk kajian penguasaan lahan dan penataan lahan.

Jumlah rumahtangga contoh masing-masing desa sekitar 20 rumahtangga. Pemilihan rumahtangga contoh secara *purposive stratified*, diharapkan dari rumahtangga contoh dapat menggambarkan pemilikan lahan sempit sampai luas di masing-masing desa contoh. Penyebaran desa contoh adalah sebagai berikut : Desa Tabing, Kecamatan Bonjol dan Desa Petok, Kecamatan Panti (Sumatera Barat); Desa Mundu, Kecamatan Tulung dan Mireng, Kecamatan Trucuk (Jawa Tengah), Desa Sompak dan Aur Sampuk Kecamatan Mempawah Hulu (Kalimantan Barat).

Dalam penelitian ini akan digunakan metode survai dan RRA. Dalam metode survai, pengumpulan data dilakukan dari sebagian populasi (*sampling*) yang dianggap mewakili keseluruhan ciri populasi yang hendak diketahui (*representative*), sedangkan metode RRA ditujukan untuk memperdalam dan memperluas informasi kualitatif yang dikumpulkan melalui survey. Responden contoh akan dipilih secara proporsif terstratifikasi berdasarkan luas penguasaan lahan dan keragaman sumber pendapatan rumah tangga.

Metoda Analisis

Untuk menjawab tujuan pertama dan kedua akan dilakukan analisis deskriptif dengan tabulasi silang berdasarkan data tata guna lahan dan data struktur pendapatan rumahtangga, serta analisis indek gini untuk mengukur ketimpangan penguasaan lahan dan ketimpangan pendapatan. Untuk menjawab tujuan ketiga dilakukan analisis korelasi antara penguasaan lahan dengan pendapatan. Sementara itu untuk melihat lebih jauh ada tidaknya keterkaitan antara ketimpangan penguasaan lahan dengan ketimpangan pendapatan pada masing-masing lokasi dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Secara ringkas formulasi untuk penghitungan ketimpangan distribusi penguasaan lahan dan pendapatan digunakan Indek Gini (G) adalah sebagai berikut (Szal dan Robinson, 1977):

$$G = 1 + \frac{1}{n} - 2/n^2 Yr \left[\sum_{i=1}^n Y_i \right]$$

Di mana : n = jumlah rumah tangga contoh.

Y_i = luas lahan yang dimiliki/dikuasai oleh rumah tangga ke i atau tingkat pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga ke i.
 Y_r = rata-rata luas lahan yang dimiliki/dikuasai atau rata-rata pendapatan yang diperoleh.

Tahap selanjutnya juga dilakukan analisis regresi sederhana, yang secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_i = a + b X_i + e_i$$

Di mana: Y_i = rata-rata pendapatan dari rumah tangga petani ke i
 X_i = rata-rata penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga ke i
 e_i = kesalahan pengganggu

TINJAUAN HISTORIS HUBUNGAN PENGUSAHAAN LAHAN DENGAN PENDAPATAN DI PEDESAAN INDONESIA

Sumaryanto dan Rusastra (2000) menelaah data Sensus Pertanian (SP) 1983 dan 1993 untuk melihat struktur penguasaan tanah di tingkat makro. Hasil SP 1993 menunjukkan bahwa struktur pemilikan tanah rumah tangga pertanian cukup timpang, sekitar 49 persen rumah tangga pertanian tanaman pangan termasuk kelompok dengan penguasaan kurang dari 0,5 hektar, dengan rata-rata luas penguasaan sekitar 0,24 hektar. Sementara pada tahun 1983 sebesar 41 persen, dengan rata-rata luas penguasaan 0,26 hektar. Di sisi lain, terjadi kecenderungan menurunnya proporsi rumah tangga yang termasuk kelompok penguasaan tanah 0,51 hektar ke atas, tetapi rata-rata luas penguasaannya bervariasi.

Pada umumnya tidak mengalami perubahan yang menyolok, terkecuali pada golongan penguasaan 15 hektar ke atas. Pada kelompok yang disebut terakhir ini, proporsinya turun drastis dari 0,19 persen menjadi 0,06 persen tetapi rata-rata luas penguasaannya meningkat dari 20,7 hektar menjadi 22,2 hektar. Dengan demikian selama periode 1983 – 1993 terjadi perubahan struktur penguasaan rumah tangga pertanian dan yang paling menonjol adalah makin banyaknya petani gurem dengan luas penguasaannya yang semakin menyempit, dan di sisi lain terjadi pengumpulan penguasaan pada sebagian kecil rumah tangga bertanah luas. Apakah fenomena ini mengindikasikan terjadinya polarisasi penguasaan tanah di pedesaan?

Pada awal tahun 1980-an, menurut Wiradi dan Makali (1984) terdapat 2 kelompok pakar/peneliti yang berbeda pendapat tentang struktur penguasaan tanah di pedesaan. Kelompok pertama, yaitu Geertz, Hayami dan Kikuchi berpendapat bahwa di masyarakat pedesaan di Jawa tidak terkutub menjadi petani luas (tuan tanah) dan petani gurem (hamba

tani), namun lebih merupakan stratifikasi yang meningkat. Kelompok lain adalah Sayogyo, Collier, Lyon dan Kano yang berpendapat bahwa pengutuban masyarakat desa dalam hal penguasaan tanah memang sedang terjadi. Dinamika struktur penguasaan tanah 1983-1993 memperkuat pendapat kelompok kedua (Sumaryanto dan Rusastra, 2000; Rusastra dan Sudaryanto, 1997).

Data di tingkat mikro juga menunjukkan gejala ketimpangan pemilikan lahan dan peningkatan proporsi rumah tangga tunakisma terutama di pedesaan Jawa. Hasil penelitian Studi Dinamika Pedesaan (SDP) pada tahun 1982 di 12 desa di Jawa dan 3 desa di luar Jawa (Sulawesi Selatan) menunjukkan bahwa hampir di semua desa, Indeks Gini pemilikan tanah di atas 0,60. Terutama di Jawa, 6 dari 12 desa, indeks Gininya di atas 0,80, suatu tingkat ketimpangan yang berat. Temuan lain yang sangat bermakna adalah hampir di semua desa, 30 persen atau lebih rumah tangga tidak memiliki tanah, sedangkan kurang dari 20 persen rumah tangga memiliki setengah atau lebih dari total luas sawah yang ada (Wiradi dan Makali, 1984).

Hasil penelitian Panel Petani Nasional (PATANAS) tahun 1994/1995 dan 1998/1999 juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Selama periode tersebut, proporsi rumah tangga yang tidak mempunyai tanah cenderung meningkat, kecuali di desa perkebunan di luar Jawa. Indeks Gini di Jawa cenderung meningkat dari 0,72 menjadi 0,78, demikian juga di luar Jawa, meningkat dari 0,53 menjadi 0,54. Nampak bahwa ketimpangan pemilikan tanah di Jawa lebih besar dibandingkan luar Jawa (Adnyana, 2000).

Selama ini ada anggapan bahwa pendapatan yang diperoleh rumah tangga pedesaan dari usahatani berhubungan dengan luas penguasaan sawah (milik dan bukan milik). Semakin luas tanah yang dimiliki, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh dari usahatani. Schrevel (1989) melakukan studi kasus di desa Cidurian (desa yang berbatasan dengan kota besar), dan menyatakan bahwa akses atas tanah tampaknya tidak memadai lagi dijadikan indikator tingkat pendapatan rumah tangga pedesaan. Penelitian di Cidurian itu menunjukkan peran kegiatan di luar pertanian justru semakin menentukan. Dan hanya terdapat korelasi positif yang rendah antara tingkat penguasaan tanah dengan tingkat pendapatan non pertanian.

Hasil penelitian SDP di 15 desa menunjukkan bahwa apabila distribusi pendapatan dikaitkan dengan strata luas pemilikan tanah, masih jelas nampak bahwa makin besar luas tanah milik makin besar pula pendapatan rata-rata rumah tangga. Namun, separuh dari jumlah desa yang diteliti ternyata sektor non pertanian memberikan sumbangan lebih dari 50 persen dari total pendapatan, semakin dekat dengan daerah perkotaan semakin besar proporsi pendapatan dari sektor non pertanian. Dengan demikian, rumah tangga yang memiliki tanah luaslah yang mempunyai jangkauan lebih besar ke sumber non-pertanian (Wiradi dan Makali, 1984).

Tingkat pendapatan rumah tangga pedesaan menurut luas pemilikan tanah hasil penelitian Patanas 1994/1995 dan 1998/1999 menunjukkan struktur yang berbeda. Proporsi sumbangan pendapatan dari sektor non pertanian yang relatif besar terjadi pada kelompok tunakisma dan pemilikan tanah rendah/sempit, baik di Jawa maupun luar Jawa. Sementara itu, proporsi pendapatan dari usaha pertanian berkorelasi positif dengan luas pemilikan tanah, semakin tinggi luas pemilikan tanah semakin tinggi proporsi pendapatan dari usaha pertanian. Proporsi pendapatan dari usaha pertanian meningkat pada kelompok tunakisma, pemilikan rendah dan sedang. Sementara pada kelompok pemilikan luas cenderung menurun, penurunan ini terutama terjadi luar Jawa. Di Jawa proporsi pendapatan dari usaha pertanian cenderung meningkat untuk semua kelompok. Di Jawa sumbangan pendapatan dari sektor non-pertanian meningkat hanya pada kelompok tunakisma, sementara pada rumah tangga yang memiliki tanah cenderung menurun. Sementara di luar Jawa meningkat untuk semua kelompok.

STRUKTUR DAN PENGUASAAN LAHAN DI PEDESAAN KABUPATEN KLATEN, PASAMAN DAN LANDAK

Struktur Pemilikan Lahan

Lahan merupakan asset utama bagi masyarakat pedesaan dan pemilikan lahan akan menentukan status sosial pemiliknya, semakin luas lahan yang dimiliki semakin tinggi status sosialnya. Keragaan luas pemilikan lahan dan jumlah persil di masing-masing desa contoh ditampilkan pada Tabel 1. Dari tabel tersebut terlihat bahwa luas pemilikan lahan di desa-desa contoh luar Jawa (berkisar antara 1,50 – 3,96 hektar per rumah tangga) relatif lebih tinggi dibandingkan dengan luas pemilikan di desa contoh di Jawa (0,42 – 0,514 ha). Dan pemilikan lahan di desa contoh Kalimantan Barat (2,56 – 3,96 ha) lebih tinggi dibandingkan Sumatera Barat (1,50 – 1,99 ha). Kasus di Sumatera Barat di desa Tabing menunjukkan bahwa rata-rata total pemilikan lahan sebesar 1,50 hektar, sebagian besar terdiri atas lahan perkebunan (1,11 ha per rumahtangga di dalam desa dan 0,05 ha di luar desa), sedangkan rata-rata lahan sawah relatif kecil, hanya seluas 0,29 hektar. Sementara di desa Petok, total pemilikan lahan 1,99 hektar yang sebagian besar berupa lahan sawah dengan rata-rata pemilikan 1,18 hektar (sebagian besar ada di dalam desa) dan rata-rata pemilikan kebun 0,81 hektar. Hal ini terkait dengan pemilihan desa contoh, desa Tabing berbasis lahan perkebunan dan desa Petok berbasis lahan sawah.

Kasus di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pemilikan lahan didominasi oleh lahan perkebunan dan lahan sawah yang terletak di dalam desa. Rata-rata pemilikan lahan perkebunan per rumahtangga dalam desa di desa Sompak 1,63 hektar, lahan sawah 1,48 hektar, lahan tegalan 0,44 hektar dan lahan pekarangan 0,14 hektar. Sementara pemilikan lahan di Desa Aur Sampuk relatif lebih kecil dibandingkan dengan desa Sompak, dengan rata-rata pemilikan lahan perkebunan 1,2 hektar, lahan sawah 0,91 hektar, lahan tegalan 0,33

hektar dan pekarangan 0,09 hektar. Di dua desa kasus tersebut pemilikan lahan di luar desa relatif kecil. Apakah rataan pemilikan lahan terkait dengan tingkat aksesibilitas, kasus di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa rataan total pemilikan lahan di desa yang relatif belum terbuka (3,69 ha) lebih tinggi dibandingkan dengan desa yang sudah terbuka (2,53 ha). Fakta bahwa pemilikan lahan di Sumatera Barat dan Kalimantan Barat yang masih relatif luas menunjukkan bahwa ketersediaan sumberdaya lahan di desa contoh masih belum langka, berbeda dengan kasus di Jawa pada umumnya.

Tabel 1. Penguasaan Lahan Milik di Dalam dan Luar Desa/Nagari di Wilayah Adat di Tiga Propinsi Contoh, Tahun 2002

Lokasi dan jenis lahan	Sumatera Barat				Jawa Tengah				Kalimantan Barat			
	Desa 1		Desa 2		Desa 1		Desa 2		Desa 1		Desa 2	
	Per-sil	Luas (ha)	Per-sil	Luas (ha)	Per-sil	Luas (ha)	Per-sil	Luas (ha)	Per-sil	Luas (ha)	Per-sil	Luas (ha)
Dalam desa												
- Sawah	0,6	0,29	1,15	1,15	0	0	1,61	0,36	1,4	1,48	1,4	0,91
- Tegalan	0	0	0,05	0	1,73	0,27	0	0	0,75	0,44	0,75	0,33
- Kebun	1,55	1,11	1,3	0,81	0	0	0	0	1,05	1,63	1,45	1,2
- Pekarangan	0,15	0,05	0,55	0	1,05	0,2	0,43	0,06	0,8	0,14	0,8	0,09
- Kolam	0	0	1,06	0	0	0	0	0	0,1	0	0,05	0
- Jumlah	2,3	1,45	4,1	1,96	2,78	0,47	2,04	0,42	4,1	3,69	4,45	2,53
Luar desa												
- Sawah	0	0	0,05	0,03	0,14	0,024	0	0	0,15	0,17	0,05	0,03
- Tegalan	0	0	0	0	0,14	0,01	0	0	0,05	0	0,05	0
- Kebun	0,05	0,05	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0
- Pekarangan	0	0	0	0	0,09	0,01	0	0	0	0	0	0
- Kolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Jumlah	0,05	0,05	0,05	0,03	0,37	0,044	0	0	0,3	0,27	0,3	0,03
- Total	2,35	1,5	4,15	1,99	3,15	0,514	0,24	0,42	4,4	3,96	4,75	2,56

Sumber : Data primer

Kasus di dua desa contoh di Kabupaten Klaten menunjukkan gambaran yang berbeda sesuai dengan pertimbangan pemilihan desa. Di Desa Mundu yang merupakan desa lahan kering, lahan usaha berupa lahan tegalan dengan rataan pemilikan 0,27 hektar dan lahan pekarangan dengan rataan pemilikan 0,2 hektar. Sementara di Desa Mireng yang merupakan desa persawahan, pemilikan lahan sebagian besar berupa lahan sawah dengan rataan pemilikan 0,36 hektar dan rataan pemilikan pekarangan 0,06 hektar, relatif kecil dibandingkan dengan rataan pekarangan di Desa Mundu.

Dari Tabel 1 juga terlihat bahwa dari total pemilikan lahan terdiri atas beberapa persil berkisar antara 2 – 3 persil, tidak terdapat perbedaan nyata antara desa kasus Jawa dan luar Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa luasan persil di Jawa lebih kecil dibandingkan dengan luar Jawa. Hal ini sesuai dengan fakta yang ada bahwa lahan di Jawa relatif lebih sempit dengan jumlah penduduk pedesaan yang lebih besar.

Pada Tabel 2 ditampilkan status penguasaan lahan milik dalam dan luar desa, dan terlihat bahwa sebagian besar lahan milik digarap sendiri, bahkan kasus di desa Mundu (Jawa Tengah) tidak ada lahan milik yang digarapkan ke orang lain. Hal ini antara lain disebabkan karena pemilikan lahan berupa lahan tegalan dengan rataan pemilikan relatif rendah, nilai sewa lahan rendah dan sistem sakap tidak menguntungkan karena produktivitas lahan relatif rendah, berdasarkan informasi kualitatif di lapang diperoleh

informasi bahwa di semua desa contoh terjadi pengalihan hak pengusahaan lahan milik melalui mekanisme sewa-menyewa, sakap-menyakap dan gadai.

Kasus pengalihan hak pengusahaan lahan milik di Sumatera Barat dan Jawa Tengah ditemukan dalam bentuk sakap, sewa dan gadai. Dimana untuk pedesaan contoh yang mewakili lahan sawah di Klaten (Jawa Tengah) sistem pengalihan hak pengusahaan lahan milik ke pihak lain dominan dalam bentuk sewa, sedangkan untuk desa conyoh lahan tegalan dominan dalam bentuk sistem bagi hasil. Sistem gadai hanya ditemukan pada desa contoh tegalan. Di pedesaan contoh Pasaman (Sumatera Barat) sistem sewa dominan ditemukan pada desa contoh lahan sawah, sedangkan sistem bagi hasil dan gadai ditemukan baik di desa contoh lahan sawah maupun desa perkebunan. Sementara di Kalimantan Barat sistem pengalihan hak pengusahaan lahan milik ke pihak lain dalam bentuk sakap dan sewa. Dimana intensitas pengalihan hak garapan lebih tinggi pada desa contoh lahan sawah. Hal ini tergantung dengan kebiasaan yang berlaku di wilayah setempat. Rendahnya pengalihan hak pengusahaan lahan memberikan indikasi bahwa lahan usaha baik di Jawa maupun luar Jawa semakin terbatas, dan masing-masing diusahakan sendiri oleh pemiliknya. Hal ini akan mengakibatkan semakin melemahnya posisi tawar-menawar petani penyewa maupun penyakap.

Uraian di atas adalah berdasarkan total lahan, pembahasan selanjutnya berdasarkan analisis menurut persil. Baik di desa contoh luar Jawa maupun Jawa menunjukkan bahwa lahan usaha sebagian besar terletak di dalam desa (yang berkisar antara 92 –100%), seperti terlihat pada Tabel 3. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas pemilikan asset relatif rendah. Dari Tabel 3 juga terlihat proporsi jenis lahan menurut jenis lahan. Kasus di Sumatera Barat di desa Tabing menunjukkan sebagian besar persil lahan milik terdiri atas lahan perkebunan, sementara di desa Petok, sebagian besar berupa lahan sawah. Kasus di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa persil pemilikan lahan didominasi oleh lahan sawah sementara dari sisi luasan sebagian besar berupa lahan perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa luasan persil perkebunan lebih luas dibandingkan dengan luasan persil sawah. Kasus di 2 desa contoh di Kabupaten Klaten menunjukkan gambaran yang berbeda sesuai dengan pertimbangan pemilihan desa. Di desa Mundu yang merupakan desa lahan kering, lahan usaha berupa lahan tegalan dan lahan pekarangan. Sementara di desa Mireng yang merupakan desa persawahan, pemilikan lahan sebagian besar persil berupa lahan sawah.

Tabel 2. Status Pengusahaan Lahan Milik di Dalam Desa/Nagari di Wilayah Adat di Tiga Propinsi Contoh, Tahun 2002

Propinsi	Jenis lahan	Desa 1 ⁾					Desa 2 ⁾				
		Digarap sendiri	Disa- kapkan	Dise- wakan	Diga- daikan	Jumlah	Digarap sendiri	Disa- kapkan	Dise- wakan	Diga- daikan	Jumlah
Dalam Desa/Nagari - Sumatera Barat	Sawah	0,24	0,05	0	0	0,29	1,13	0	0,02	0	1,15
	Tegalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kebun	1,11	0	0	0	1,11	0,72	0	0	0,09	0,81
	Pekarangan	0,05	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0
	Kolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Jawa Tengah	Sawah	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,06	0,03	0,36
	Tegalan	0,27	0	0	0	0,27	0	0	0	0	0
	Kebun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pekarangan	0,2	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0,06
	Kolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kalimantan Barat	Sawah	0,87	0,16	0,45	0	1,48	0	0	0,18	0	0,91
	Tegalan	0,44	0	0	0	0,44	0	0	0	0	0,33
	Kebun	1,38	0,05	0,2	0	1,63	0,1	0,1	0	0	1,2
	Pekarangan	0,14	0	0	0	0,14	0	0	0	0	0,09
	Kolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Luar Desa/Nagari - Sumatera Barat	Sawah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
	Tegalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kebun	0,05	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0
	Pekarangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Jawa Tengah	Sawah	0,02	0	0,0041	0	0,024	0	0	0	0	0
	Tegalan	0,01	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0
	Kebun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pekarangan	0,1	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0
	Kolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kalimantan Barat	Sawah	0,08	0,09	0	0	0,17	0	0	0	0	0,03
	Tegalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kebun	0,1	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0
	Pekarangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data primer (diolah)

Keterangan: *) Sumatera Barat : Desa 1 : Tabing
 Jawa Tengah : Desa 1 : Mundu
 Kalimantan Barat : Desa 1 : Sompak

Desa 2 : Petok
 Desa 2 : Mireng
 Desa 2 : Aur Sampuk

Tabel 3. Tingkat Partisipasi Pemilikan Lahan menurut Lokasi Lahan dan Jenis Lahan (%) di Tiga Propinsi Contoh, tahun 2002

Uraian	Desa 1		Desa 2	
	Dalam desa	Luar desa	Dalam desa	Luar desa
Sumatera Barat				
Sawah	34.78	-	50.94	1.89
Tegalan	4.35	-	7.55	0.00
Kebun	58.70	2.17	33.96	1.89
Pekarangan		0.00	3.77	0.00
Jumlah (%)	97.83	2.17	96.23	3.77
Jumlah persil	45.00	1.00	51.00	2.00
Jawa Tengah				
Sawah	0.00	1.69	97.30	-
Tegalan	61.02	6.78	0.00	-
Kebun	0.00	0.00	0.00	-
Pekarangan	27.12	3.39	2.70	-
Jumlah (%)	88.14	11.86	100.00	-
Jumlah persil	52.00	7.00	37.00	-
Kalimantan Barat				
Sawah	36.23	2.90	34.18	1.27
Tegalan	20.29	1.45	15.19	1.27
Kebun	24.64	2.90	26.58	1.27
Pekarangan	11.59	0.00	20.25	0.00
Jumlah (%)	92.75	7.25	96.20	3.80
Jumlah persil	64	5	76	3

Sumber : Data primer (diolah)

Catatan : Analisis berdasarkan pemilikan lahan menurut persil

Struktur Lahan Garapan

Terjadinya pengalihan garapan pemilik ke penggarap mengakibatkan adanya *renting-out* dari sisi pemilik dan *renting-in* bagi penggarap. Secara umum total garapan merupakan lahan milik dikurangi *renting-out* ditambah dengan *renting-in* (garapan bukan milik). Adanya pengalihan hak penggarapan lahan dari pemilik ke penggarap akan menyebabkan perbedaan antara luas pemilikan dan luas garapan. Dari uraian di atas terlihat bahwa *renting-out* di desa-desa contoh relatif sedikit, sebagian besar lahan digarap sendiri. Pembahasan lahan garapan rumahtangga contoh dibedakan atas jenis lahan dan asal garapan (milik dan bukan milik yang terdiri atas sakap, sewa, gadai dan lainnya), seperti terlihat pada Tabel 4.

Secara umum luas garapan di tiga propinsi contoh lebih tinggi dibandingkan dengan luas lahan milik. Hal ini mengindikasikan bahwa lahan *renting-out* lebih kecil dari *renting-in*, dengan kata lain bahwa lahan garapan rumahtangga contoh masih memungkinkan untuk ditambah, bahkan kasus di luar Jawa yang pemilikannya sudah relatif luas juga terjadi *renting-in* pada rumahtangga contoh.

Tabel 4 memperlihatkan bahwa sebagian besar lahan garapan berasal dari lahan milik, sementara garapan bukan milik (*renting-in*) relatif kecil. Gambaran ini menunjukkan bahwa penawaran pengalihan penggarapan lahan semakin terbatas, diduga hal ini antara lain disebabkan karena semakin berkurangnya pemilikan lahan serta terbatasnya alternatif kesempatan kerja di luar pertanian. Di desa Tabing (Sumatera Barat), total lahan garapan 1,93 hektar yang terdiri atas 1,82 hektar di dalam desa dan 0,05 hektar di luar desa, *renting-in* di desa ini terjadi pada lahan sawah di dalam desa dengan bentuk sakap, sewa dan gadai dengan luasan yang relatif kecil serta lainnya seluas 0,3 hektar. Di Desa Petok, total lahan garapan 2,04 hektar yang sebagian besar berupa lahan sawah yang berasal dari lahan milik. Bentuk pengalihan lahan garapan di desa ini adalah sakap, sewa di lahan sawah dalam desa dan lainnya di lahan kebun.

Total lahan garapan di desa Mundu 0,529 hektar (terdiri dari garapan dalam desa 0,48 dan garapan luar desa 0,049 ha), sesuai dengan kriteria pemilihan desa maka sebagian besar lahan garapan berupa lahan tegalan. Penambahan lahan garapan rumahtangga contoh pada lahan tegalan dalam desa dengan cara gadai, sementara penambahan lahan garapan sawah berasal dari luar desa dalam bentuk sakap dan sewa karena di desa itu memang tidak ada lahan sawah. Pada umumnya rumahtangga contoh ingin mempunyai garapan sawah dalam rangka untuk pemenuhan konsumsi beras, namun nampak bahwa penawaran garapan relatif terbatas sehingga garapan lahan sawah secara rata-rata juga relatif kecil. Sementara total lahan garapan di Desa Mireng 0,8 hektar yang terdiri dari garapan dalam desa 0,69 hektar dan luar desa 0,11 hektar.

Kasus pengalihan hak penggarapan di desa persawahan lebih tinggi dibandingkan dengan dengan desa lahan kering, sehingga total lahan garapan di desa Mireng lebih tinggi dibandingkan desa Mundu, berbeda dengan total pemilikan lahan. Bentuk-bentuk pengalihan penggarapan sawah di Desa Mireng adalah sakap, sewa dan lainnya.

Berbeda dengan kasus di propinsi Sumatera Barat dan Jawa Tengah, total garapan di Kalimantan Barat lebih rendah dibandingkan dengan total pemilikan lahan, sementara dari Tabel 4 juga terlihat adanya *renting-in*, artinya di desa-desa contoh di wilayah ini ada kecenderungan *renting-out* lebih tinggi dibandingkan dengan *renting-in*. Total lahan garapan di desa Sompak 3,29 hektar lebih rendah dibandingkan total pemilikan lahan 3,96 hektar, *renting-in* yang terjadi seluas 0,28 ha yang terjadi pada lahan sawah dalam desa 0,18 hektar dalam bentuk sewa, dan pada lahan kebun dalam desa seluas 0,1 hektar dalam bentuk sakap. Seperti halnya di Desa Sompak, di Desa Aur Sampuk total lahan garapan (2,33 ha) lebih kecil dari total pemilikan lahan (2,56 ha). *Renting-in* di desa ini hanya terjadi pada lahan sawah di dalam desa dengan bentuk pengalihan berupa sistem sakap.

Tabel 4. Penguasaan Lahan Garapan di Dalam Desa/Nagari di Wilayah Adat di Tiga Propinsi Contoh, Tahun 2002

Propinsi	Jenis lahan	Desa 1						Desa 2					
		Milik sendiri	Menyajakap	Menyewa	Menggadai	Lainnya	Jumlah	Milik sendiri	Menyajakap	Menyewa	Menggadai	Lainnya	Jumlah
Dalam Desa/Nagari Sumatera Barat	Sawah	0,24	0,08	0,01	0,03	0,3	0,66	1,13	0,13	0,01	-	-	1,27
	Tagalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kebun	1,11	-	-	-	-	1,11	0,72	-	-	-	-	0,74
	Pekarangan	0,05	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-
	Total		1,4	0,08	0,01	0,03	0,3	1,82	1,85	0,13	0,01	-	-
Jawa Tengah	Sawah	-	-	-	-	-	-	0,26	0,02	0,3	-	-	0,63
	Tagalan	0,27	-	-	0,01	-	0,28	-	-	-	-	-	-
	Kebun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pekarangan	0,2	-	-	-	-	0,2	0,06	-	-	-	-	0,06
	Total		0,47	-	-	0,01	-	0,48	0,32	0,02	0,03	-	-
Kalimantan Barat	Sawah	0,87	0,03	0,1	0,05	0,1	1,15	0,73	0,05	-	-	-	0,78
	Tagalan	0,44	-	-	-	-	0,44	0,33	-	-	-	-	0,33
	Kebun	1,38	-	-	-	-	1,38	1,1	-	-	-	-	1,1
	Pekarangan	0,14	-	-	-	-	0,14	0,09	-	-	-	-	0,09
	Total		2,83	0,03	0,1	0,05	0,1	3,11	2,25	0,05	-	-	-
Luar Desa/Luar Nagari Sumatera Barat	Sawah	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	0,03
	Tagalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kebun	0,05	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-
	Pekarangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total		0,05	-	-	-	-	0,05	0,03	-	-	-	-
Jawa Tengah	Sawah	0,02	0,0041	0,005	-	-	0,029	-	-	0,11	-	-	0,11
	Tagalan	0,01	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-
	Kebun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pekarangan	0,01	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-
	Total		0,04	0,0041	0,005	-	-	0,049	-	-	0,11	-	-
Kalimantan Barat	Sawah	0,08	-	-	-	-	0,08	0,03	-	-	-	-	0,03
	Tagalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kebun	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
	Pekarangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total		0,18	-	-	-	-	0,18	0,03	-	-	-	-

Sumber: Data primer (diolah)

Keterangan : Sumatera Barat : Desa 1 : Tabing Desa 2 : Petok
 Jawa Tengah : Desa 1 : Mundu Desa 2 : Mireng
 Kalimantan Barat : Desa 1 : Sompak Desa 2 : Aur Sampuk

Tingkat Kemerataan dan Ketimpangan Lahan Milik dan Lahan Garapan

Distribusi penguasaan lahan milik dan lahan garapan dihitung dengan Indeks Gini (G), besaran nilai koefisien indeks gini berkisar antara 0 sampai 1, semakin besar nilai koefisien indeks gini menunjukkan bahwa distribusi lahan milik, dan lahan garapan semakin tidak merata atau ketimpangannya semakin besar. Menurut Oshima (1976) dalam Sumaryanto dan Pasaribu (1977), ketimpangan dibagi dalam tiga kelompok yaitu apabila $G < 0,4$ ketimpangan tergolong rendah, $0,4 < G < 0,5$ ketimpangan tergolong sedang, dan $G > 0,5$ menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi.

Keragaan luas pemilikan lahan dan jumlah persil di masing-masing desa contoh di peroleh gambaran sebagai berikut. Untuk pedesaan Klaten, Jawa Tengah (0,42 – 0,514 ha), pedesaan Landak, Kalimantan Barat (2,56 – 3,96 ha), dan pedesaan Pasaman, Sumatera Barat (1,50 – 1,99 ha). Berdasarkan analisis Indeks Gini di peroleh nilai koefisien indeks gini untuk lahan milik untuk pedesaan Klaten 0.21, Landak 0.32, dan pedesaan Pasaman 0.46, sedangkan untuk lahan garapan untuk masing-masing pedesaan Kabupaten contoh 0,16, 0,28, dan 0,46. Hasil tersebut menunjukkan relatif meratanya pemilikan dan penggarapan lahan, kecuali di Pasaman menunjukkan adanya ketimpangan yang ringan. Namun, yang perlu di ungkap di sisni bahwa semua responden adalah petani pemilik yang sekaligus penggarap lahan, sehingga tidak tercakup rumah tangga buruh tani atau petani murni penggarap.

Kasus di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pemilikan lahan didominasi oleh lahan perkebunan dan lahan sawah yang terletak di dalam desa. Rataan pemilikan lahan perkebunan per rumahtangga dalam desa di desa Sompak 1,63 ha, lahan sawah 1,48 ha, lahan tegalan 0,44 ha dan lahan pekarangan 0,14 ha. Sementara pemilikan lahan di Desa Aur Sampuk relatif lebih kecil dibandingkan dengan desa Sompak, dengan rataan pemilikan lahan perkebunan 1,2 ha, lahan sawah 0,91 ha, lahan tegalan 0,33 ha dan pekarangan 0,09 ha . Di dua desa kasus tersebut pemilikan lahan di luar desa relatif kecil.

Secara umum luas garapan di tiga propinsi contoh lebih tinggi dibandingkan dengan luas lahan milik dan ketimpangan lahan garapan lebih rendah dibandingkan ketimpangan pemilikan. Hal ini mengindikasikan bahwa lahan *renting-out* lebih kecil dari *renting-in*, dengan kata lain bahwa lahan garapan rumahtangga contoh masih memungkinkan untuk ditambah, namun sudah relatif terbatas. Sebagian besar lahan garapan berasal dari lahan milik, sementara garapan bukan milik (*renting-in*) relatif kecil. Gambaran ini menunjukkan bahwa penawaran pengalihan penggarapan lahan semakin terbatas, diduga hal ini antara lain disebabkan karena semakin berkurangnya pemilikan lahan serta terbatasnya alternatif kesempatan kerja di luar pertanian.

Secara terperinci hasil analisis indeks gini baik untuk penguasaan lahan milik, lahan garapan, dan pendapatan rumah tangga contoh di pedesaan contoh Klaten Jawa Tengah,

pedesaan contoh Landak Kalimantan Barat, dan pedesaan contoh Pasaman, Sumatera Barat dapat di simak pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Nilai Koefisien Indek Gini Lahan Milik, Lahan Garapan di Pedesaan Klaten Jawa Tengah, Landak Kalimantan Barat, dan Pasaman Sumatera Barat, Tahun 2001-2002

No.	Uraian	Lahan Milik	Lahan Garapan
1.	Klaten	0.21	0.16
2.	Landak	0.32	0.28
3.	Pasaman	0.46	0.46

Sumber : data primer (diolah)

STRUKTUR DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAHTANGGA PETANI

Struktur Pendapatan Rumah tangga Petani

Tingkat pendapatan rumah tangga merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut. Ragam sumber pendapatan di masyarakat pedesaan antara lain adalah usaha pertanian (dari lahan milik maupun bukan milik), berburuh tani, menyewakan asset pertanian, usaha industri, usaha dagang, usaha jasa dan angkutan, kegiatan, bertukang, tenaga profesional (pegawai swasta dan PNS), berburuh non pertanian, transfer, dari alam bebas dan lainnya. Keragaan struktur pendapatan rumah tangga contoh di tiga propinsi ditampilkan pada Tabel 6. Tingkat pendapatan dan struktur pendapatan masing-masing desa bervariasi, tingkat pendapatan rumah tangga di 6 desa contoh bervariasi dari Rp. 5,9 – Rp 8,1 juta per tahun. Peranan sektor pertanian yang terdiri atas usaha pertanian (dari lahan milik maupun bukan milik), berburuh tani, menyewakan asset pertanian dan lainnya berkisar dari 54,30 – 85,57 persen dari total pendapatan rumah tangga, sumbangan pendapatan pertanian di desa contoh berbeda dengan gambaran makro, dimana sumbangan sektor pertanian tahun 2001 terhadap PDB hanya 16,39 persen.

Pendapatan rumah tangga di Sumatera Barat berkisar antara Rp 8,1 juta (desa Tabing) dan Rp 7,3 juta di desa Petok. Di wilayah ini peranan sektor pertanian dalam menyumbang pendapatan rumah tangga masih relatif lebih besar dibandingkan dengan sektor non pertanian, yaitu sekitar 60 persen dibanding 40 persen. Di sektor pertanian, pendapatan masih didominasi oleh usaha pertanian yang berupa usahatani buah-buahan, gambaran ini terjadi di kedua desa contoh. Nampaknya, lahan perkebunan di kedua desa contoh ini diusahakan dengan tanaman buah-buahan. Sementara ragam sumber pendapatan sektor non pertanian berbeda, di Desa Tabing, yang berkembang adalah usaha industri dan tenaga profesional, sedangkan di desa Petok yang berkembang adalah pendapatan dari tukang.

Keragaan struktur pendapatan antar desa contoh di Jawa Tengah berbeda walaupun tingkat pendapatan rumahtangga per tahun relatif sama, yaitu Rp 6,9 juta di Desa Mundu dan Rp 6,7 juta di Desa Mireng. Di desa Mundu yang merupakan desa lahan kering, sumbangan sektor pertanian terhadap total pendapatan sebesar 54,3 persen, yang sebagian besar merupakan pendapatan dari usahatani perkebunan dan usahatani padi. Di Desa Mundu ragam usahatani antara lain usahatani lahan kering, usahatani palawija, usahatani sayuran terutama cabai rawit, usahatani buah-buahan dan usahatani perkebunan. Sementara di sektor non pertanian yang berkembang adalah usaha industri, yang memberikan sumbangan pendapatan cukup besar yaitu 42 persen dari total pendapatan. Kasus di desa Mireng menunjukkan bahwa sumbangan sektor pertanian terhadap total pendapatan rumahtangga relatif besar (75,54%) yang antara lain dari lainnya (40,8%) dan usaha pertanian (23,82%). Usaha pertanian yang ada di desa ini adalah usahatani padi dan usahatani perkebunan di lahan pekarangan. Disamping itu, pendapatan sektor pertanian juga diperoleh dari berburuh tani (baik sebagai buruh tani trampil maupun tidak trampil), menyewakan asset pertanian (alsintan dan atau ternak) dan pengalihan penggarapan lahan (menyewakan dan atau menyakapkan lahan). Sektor non pertanian yang berkembang di desa Mireng adalah usaha industri mebeuler yang menyumbang 17,79 persen dari total pendapatan.

Tingkat pendapatan rumahtangga di desa contoh Kalimantan Barat relatif lebih rendah dibandingkan dengan desa contoh di propinsi lainnya, yaitu Rp 5,9 juta per tahun di desa Sompak, dan Rp 6,6 juta per tahun di Desa Aur Sampuk. Peranan sektor pertanian terhadap total pendapatan rumahtangga masih relatif besar yaitu berkisar antara 72 – 85 persen. Di Desa Sompak pendapatan sektor pertanian sebagian besar berasal dari usaha pertanian yaitu dari usahatani buah-buahan dan usahatani perkebunan, sementara sumber pendapatan non pertanian berasal dari gaji sebagai tenaga profesional serta usaha jasa dan angkutan. Di Desa Aur Sampuk, usahatani buah-buahan menyumbang 63,12 persen terhadap total pendapatan rumahtangga.

Tabel 6. Struktur Pendapatan Rumah tangga per Tahun di Tiga Propinsi Contoh, Tahun 2002

No.	Sumber pendapatan	Sumatera Barat				Jawa Tengah				Kalimantan Barat			
		Tabing		Petok		Mundu		Mireng		Sompok		Aur Sampuk	
		(Rp.000/ th)	%	(Rp.000/ th)	%	(Rp.000/ th)	%	(Rp.000/ th)	%	(Rp.000/ th)	%	(Rp.000/ th)	%
I.	Pertanian	4.851	59,34	4.453	60,92	3.783	54,30	5.120	75,54	4.250	72,02	5.690	85,57
	1. Usaha Pertanian	4.741	58,00	4.313	59,00	3.472	49,84	1.615	23,82	4.175	70,75	4.707	70,79
	- Usahatani padi	0	0,00	21	0,28	1.095	15,73	495	7,31	61	1,03	54	0,97
	- Usahatani palawija	189	2,31	0	0,00	375	5,38	0	0,00	1	0,02	90	1,35
	- Usahatani sayuran	227	2,77	0	0,00	272	3,91	0	0,00	42	0,71	137	2,07
	- Usahatani buah-buahan	4.299	52,60	3.857	52,77	244	3,50	949	14,01	3.523	59,70	4.197	63,12
	- Usahatani perkebunan	0	0,00	190	2,60	1.486	21,33	2	0,03	549	9,30	192	2,89
	- Usaha peternakan	26	0,32	205	2,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	0,40
	- Usaha perikanan	0	0,00	40	0,55	0	0,00	168	2,47	0	0,00	0	0,00
	2. Buruh tani terampil	110	1,35	0	0,00	13	0,19	112	1,65	50	0,85	21	0,32
	3. Buruh tani tidak terampil	0	0	0	0,00	0	0,00	283	4,17	0	0,00	0	0,00
	4. Menyewakan ternak+alsin	0	0	22	0,30	198	2,84	300	4,43	25	0,42	100	1,50
	5. Menyewa+menyakap	0	0	118	1,62	100	1,44	46	0,67	0	0,00	113	1,69
	6. Lainnya	0	0	0	0,00	0	0,00	2.765	40,80	0	0,00	749	11,26
II.	Non Pertanian	3.324	40,66	2.857	39,08	3.183	45,70	1.658	24,46	1.851	2,44	959	14,43
	1. Usaha industri	1.188	14,53	307	4,20	2.961	42,51	1.206	17,79	144	0,00	152	2,28
	2. Usaha dagang	726	8,88	300	4,10	0	0	0	0	0	9,29	0	0,00
	3. Usaha jasa & angkutan	150	1,83	410	5,61	222	3,18	157	0,00	548	1,53	237	3,56
	4. Tukang	150	1,83	1.440	19,70	0	0	0	2,31	90	14,73	505	7,60
	5. Tenaga profesional	1.050	12,84	180	2,46	0	0	296	0,00	869	0	66	0,99
	6. Buruh non pertanian	0	0	100	1,37	0	0	0	4,36	0	0	0	0
	7. Transfer	0	0	30	0,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Alam bebas	60	0,73	90	1,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	T o t a l	8.175	100	7.310	100	6.966	100	6.777	100	5.901	100	6.649	100

Sumber: Data Primer (diolah).

Tingkat Kemerataan dan Ketimpangan Pendapatan Rumahtangga Petani

Hasil kajian berdasarkan analisis Indeks gini terhadap pendapatan rumah tangga di Kabupaten contoh diperoleh hasil sebagai berikut (Tabel 7) : (1) nilai indeks gini pedesaan Klaten, Jawa Tengah menunjukkan kondisi yang relatif timpang dengan nilai koefisien indeks gini 0.60, sedangkan jika ditinjau dari struktur penguasaan lahan relatif merata, kondisi ini menunjukkan bahwa sumber ketimpangan pendapatan bersumber dari kegiatan non pertanian, khususnya sebagai usaha dagang, usaha industri, dan sebagai PNS ; (2) nilai indeks gini di pedesaan Landak, Kalimantan Barat Tengah menunjukkan ketimpangan yang ringan dengan nilai koefisien indeks gini 0.45, padahal sebagian besar sumber pendapatan masih dari pertanian yang menunjukkan adanya perbedaan dalam tingkat adopsi teknologi serta komoditas yang dikembangkan, sedangkan sumber ketimpangan dari usaha non pertanian terbatas pada PNS;(3) nilai indeks gini di pedesaan Pasaman, Sumatera Barat menunjukkan kondisi ke timpangan ringan dengan nilai koefisien indeks gini 0.48, sedangkan jika ditinjau dari struktur penguasaan lahan juga menunjukkan ketimpangan ringan, kondisi ini menunjukkan bahwa sumber ketimpangan pendapatan bersumber dari kegiatan pertanian yang disebabkan perbedaan adopsi teknologi dan komoditas yang dikembangkan dan non pertanian khususnya sebagai usaha dagang.

Tabel 7. Nilai Koefisien Indeks Gini Pendapatan Rumah Tangga Contoh di Pedesaan Klaten Jawa Tengah, Landak Kalimantan Barat, dan Pasaman Sumatera Barat, Tahun 2001-2002

No	Uraian	Pendapatan
1.	Klaten	0.60
2.	Landak	0.45
3.	Pasaman	0.48

Sumber : data primer (diolah)

HUBUNGAN ANTARA STRUKTUR PENGUSAHAAN LAHAN DENGAN STRUKTUR PENDAPATAN

Hubungan antara struktur penguasaan lahan dengan struktur pendapatan dalam penelitian dikaji melalui uji korelasi antara pendapatan sektor pertanian/pendapatan total dengan luas lahan milik dan lahan garapan. Menurut Rasahan dalam Rachman (2002) terdapat dua pola utama yang mencirikan struktur dan distribusi pendapatan masyarakat pedesaan: (1) Ada hubungan searah antara distribusi pendapatan dengan penguasaan lahan pertanian, (2) Ada hubungan terbalik antara konsentrasi pendapatan dengan konsentrasi penguasaan lahan. Korelasi pendapatan dengan penguasaan lahan di tiga propinsi contoh ditampilkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Korelasi antara Pendapatan Pertanian dan Pendapatan Total Terhadap Lahan Milik dan Lahan Garapan di Tiga Propinsi Contoh, Tahun 2002.

No.	Uraian	Pendapatan sektor pertanian	Pendapatan total
1.	Sumatera Barat		
	a. Luas lahan milik	0,21437 (0,1841)	0,28834 (0,0712)
	b. Luas lahan garapan	0,17345 (0,2844)	0,09871 (0,5445)
2.	Jawa Tengah		
	a. Luas lahan milik	-0,19565 (0,1977)	-0,04955 (0,7465)
	b. Luas lahan garapan	-0,04923 (0,7481)	0,07056 (0,6451)
3.	Kalimantan Barat		
	a. Luas lahan milik	0,10193 (0,5369)	-0,02677 (0,8715)
	b. Luas lahan garapan	0,23115 (0,1568)	0,05953 (0,7189)

Keterangan : Angka dalam kurung menunjukkan prob R.

Secara statistik, korelasi antara pendapatan pertanian dengan luas lahan milik dan juga dengan lahan garapan tidak nyata dan korelasi antar dua variabel tersebut relatif kecil. Di Sumatera Barat dan Kalimantan Barat terjadi pola hubungan yang searah antara pendapatan sektor pertanian dan luas pemilikan serta luas garapan, namun di Jawa Tengah terjadi pola hubungan terbalik antara dua variabel tersebut. Kurang nyatanya hubungan antara luas penguasaan lahan dengan pendapatan di pedesaan Jawa Tengah lebih disebabkan oleh rata-rata pemilikan lahan yang relatif homogen, sedangkan di Kalimantan Barat dan Sumatera Barat sedikit lebih bervariasi, namun dengan tingkat adopsi teknologi yang masih rendah. Bahkan untuk kasus pedesaan Landak Kalimantan Barat masih banyak lahan-lahan yang belum diusahakan atau diusahakan dengan cara gilir balik dan hampir tidak menggunakan masukan dengan produktivitas yang makin menurun karena makin pendeknya periode gilir balik dari 15 tahun ke 10 tahun dan saat ini tinggal 5-6 tahun.

Korelasi antara total pendapatan dengan lahan milik di Sumatera Barat nyata dengan koefisien korelasi 0,29. Sementara korelasi pada kasus yang lain tidak nyata. Kasus di Jawa Tengah dan Kalimantan Barat menunjukkan bahwa ada hubungan terbalik antara total pendapatan dan luas pemilikan lahan, dan terjadi hubungan yang searah antara total pendapatan dan luas garapan. Pada kasus di Jawa Tengah menunjukkan peran kegiatan usaha di luar pertanian sudah cukup besar terutama pada desa contoh yang dekat sentra industri. Sedangkan di Kalimantan Barat menunjukkan masih banyaknya lahan milik yang belum tergarap dengan baik atau penggarapan di lakukan dengan cara gilir balik, serta masih rendahnya teknologi produksi yang diterapkan. Sementara itu di Pasaman Sumatera Barat mulai ada intensifikasi dalam pengelolaan lahan dan mulai bergesernya komoditas karet rakyat ke arah karet unggul dan kakao.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

1. Keragaan luas pemilikan lahan dan jumlah persil di masing-masing desa contoh di peroleh gambaran sebagai berikut. Untuk pedesaan Klaten, Jawa Tengah (0,42 – 0,514 ha), pedesaan Landak, Kalimantan Barat (2,56 – 3,96 ha), dan pedesaan Pasaman, Sumatera Barat (1,50 –1,99 ha). Berdasarkan analisis Indek Gini di peroleh nilai koefisien indek gini untuk lahan milik untuk pedesaan Klaten 0.21, Landak 0.32, dan pedesaan Pasaman 0.46, sedangkan untuk lahan garapan untuk masing-masing pedesaan Kabupaten contoh 0,16, 0,28, dan 0,46. Hasil tersebut menunjukkan relatif meratanya pemilikan dan penggarapan lahan, kecuali di Pasaman menunjukkan adanya ketimpangan yang ringan. Namun, yang perlu diungkap di sini bahwa semua responden adalah petani pemilik yang sekaligus penggarap lahan, sehingga tidak tercakup rumah tangga buruh tani atau petani murni penggarap.
2. Kasus di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pemilikan lahan didominasi oleh lahan perkebunan dan lahan sawah yang terletak di dalam desa. Rataan pemilikan lahan perkebunan per rumahtangga dalam desa di desa Sompak 1,63 ha, lahan sawah 1,48 ha, lahan tegalan 0,44 ha dan lahan pekarangan 0,14 ha. Sementara pemilikan lahan di Desa Aur Sampuk relatif lebih kecil dibandingkan dengan desa Sompak, dengan rataan pemilikan lahan perkebunan 1,2 ha, lahan sawah 0,91 ha, lahan tegalan 0,33 ha dan pekarangan 0,09 ha . Di dua desa kasus tersebut pemilikan lahan di luar desa relatif kecil.
3. Secara umum luas garapan di tiga propinsi contoh lebih tinggi dibandingkan dengan luas lahan milik dan ketimpangan lahan garapan lebih rendah dibandingkan ketimpangan pemilikan. Hal ini mengindikasikan bahwa lahan *renting-out* lebih kecil dari *renting-in*, dengan kata lain bahwa lahan garapan rumahtangga contoh masih memungkinkan untuk ditambah, namun sudah relatif terbatas. Sebagian besar lahan garapan berasal dari lahan milik, sementara garapan bukan milik (*renting-in*) relatif kecil. Gambaran ini menunjukkan bahwa penawaran pengalihan penggarapan lahan semakin terbatas, diduga hal ini antara lain disebabkan karena semakin berkurangnya pemilikan lahan serta terbatasnya alternatif kesempatan kerja di luar pertanian.
4. Tingkat pendapatan rumahtangga merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan rumahtangga. Tingkat pendapatan dan struktur pendapatan masing-masing desa bervariasi, tingkat pendapatan rumahtangga di 6 desa contoh bervariasi dari Rp. 5,9 – Rp 8,1 juta per tahun. Peranan sektor pertanian yang terdiri atas usaha pertanian (dari lahan milik maupun bukan milik), berburuh tani, menyewakan asset pertanian dan lainnya berkisar dari 54,30 – 85,57 persen dari total pendapatan rumahtangga.

5. Pendapatan rumahtangga di Sumatera Barat berkisar antara Rp 8,1 juta (desa Tabing) dan Rp 7,3 juta di desa Petok. Tingkat pendapatan di dua desa contoh di Jawa Tengah relatif sama, yaitu Rp 6,9 juta di Desa Mundu dan Rp 6,7 juta di Desa Mireng. Sementara itu, tingkat pendapatan rumah-tangga di desa contoh Kalimantan Barat relatif lebih rendah dibandingkan dengan desa contoh di propinsi lainnya, yaitu Rp 5,9 juta per tahun di desa Sompak, dan Rp 6,6 juta per tahun di Desa Aur Sampuk.
6. Hasil kajian berdasarkan analisis Indek gini terhadap pendapatan rumah tangga di Kabupaten contoh diperoleh hasil sebagai berikut: (1) nilai indek gini pedesaan Klaten, Jawa Tengah menunjukkan kondisi yang relatif timpang dengan nilai koefisien indek gini 0.60, sedangkan jika ditinjau dari struktur penguasaan lahan relatif merata, kondisi ini menunjukkan bahwa sumber ketimpangan pendapatan bersumber dari kegiatan non pertanian, khususnya sebagai usaha dagang, usaha industri, dan sebagai PNS ; (2) nilai indek gini di pedesaan Landak, Kalimantan Barat Tengah menunjukkan ketimpangan yang ringan dengan nilai koefisien indek gini 0.45, padahal sebagian besar sumber pendapatan masih dari pertanian yang menunjukkan adanya perbedaan dalam tingkat adopsi teknologi serta komoditas yang dikembangkan, sedangkan sumber ketimpangan dari usaha non pertanian terbatas pada PNS;(3) nilai indek gini di pedesaan Pasaman, Sumatera Barat menunjukkan kondisi ke timpangan ringan dengan nilai koefisien indek gini 0.48, sedangkan jika ditinjau dari struktur penguasaan lahan juga menunjukkan ketimpangan ringan, kondisi ini menunjukkan bahwa sumber ketimpangan pendapatan bersumber dari kegiatan pertanian yang disebabkan perbedaan adopsi teknologi dan komoditas yang dikembangkan dan non pertanian khususnya sebagai usaha dagang.
7. Secara stastistik, korelasi antara pendapatan pertanian dengan luas lahan milik dan juga dengan lahan garapan tidak nyata dan korelasi antar dua variabel tersebut relatif kecil. Di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dan Kabupaten Landak, Kalimantan Barat terjadi pola hubungan yang searah antara pendapatan sektor pertanian dan luas pemilikan serta luas garapan, namun di Klaten, Jawa Tengah terjadi pola hubungan terbalik antara dua variabel tersebut. Pada fenomena yang pertama antara lain disebabkan oleh rata-rata dan keragaman luas pemilikan lahan relatif besar dan kegiatan usaha di luar sektor pertanian relatif belum berkembang. Untuk fenomena kedua disebabkan oleh rata-rata dan keragaman luas pemilikan dan garapan dan kegiatan usaha di luar sektor pertanian sudah sangat berkembang terutama di desa contoh yang dekat dengan pusat industri.
8. Korelasi antara total pendapatan dengan lahan milik di Sumatera Barat nyata dengan koefisien korelasi 0,29. Sementara korelasi pada kasus yang lain tidak nyata. Kasus di Jawa Tengah dan Kalimantan Barat menunjukkan bahwa ada hubungan terbalik antara

total pendapatan dan luas pemilikan lahan, dan terjadi hubungan yang searah antara total pendapatan dan luas garapan. Pada kasus di Jawa Tengah menunjukkan peran kegiatan usaha di luar pertanian sudah cukup besar terutama pada desa contoh yang dekat sentra industri. Sedangkan di Kalimantan Barat menunjukkan masih banyaknya lahan milik yang belum tergarap dengan baik atau penggarapan di lakukan dengan cara gilir balik, serta masih rendahnya teknologi produksi yang diterapkan.

Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan penting dari kondisi di atas adalah untuk pengembangan pertanian ditekankan pada komoditas komersial yang mempunyai tujuan pasar yang luas dan melalui peningkatan intensifikasi. Pilihan komoditas di Klaten ditekankan pada pengembangan komoditas padi dalam rangka menghasilkan beras berkualitas, komoditas tembakau untuk berbagai hasil olahan yang berkualitas, dan komoditas hortikultura khususnya melon, semangka, cabe, dan tomat. Pilihan komoditas di Kabupaten Landak adalah komoditas padi unggul, komoditas karet unggul dan Komoditas kakao. Sementara itu pilihan komoditas di Kabupaten Pasaman adalah komoditas karet unggul, kelapa sawit, dan kakao.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, M.O., et.al. 2000. *Assesing the Rural Development Impact of The Crisis in Indonesia*. CASER and The World Bank.
- Rachman,H.P.S., Supriyati dan Benny Rachman. 2003. *Struktur dan Distribusi Pendapatan Rumahtangga Petani Lahan Sawah*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian bekerja sama dengan BAPPENAS/USAID/DAI.
- Rachmat, M., Supriyati dan Hendiarto. 2000. *Dinamika Kelembagaan Lahan dan Hubungan Kerja Pertanian dalam prosiding: Perspektif Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Dalam Era Otonomi Daerah*. PSE.
- Rusastra, I W. dan T. Sudaryanto. 1997. *Dinamika Ekonomi Pedesaan Dalam Perspektif Pembangunan Nasional*. Prosiding: *Dinamika Ekonomi Pedesaan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Pertanian (Buku I)*. Puslit Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Sumaryanto dan I W. Rusastra. 2000. *Struktur Penguasaan Tanah dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Petani*. Prospektif Pembangunan Pertanian dan Pedesaan dalam Era Otonomi Daerah. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Szal,R. dan R. Robinson. 1977. *Measuring Income Inequality dalam C.R. Frank and R.C. Webb (eds). Income Distribution and Growth in Less Develeoped Countries*. The Brooking Institution. Pp.: 491-533.
- Wiradi, G. dan Makali. 1984. *Penguasaan Tanah dan Kelembagaan dalam Kasryno (Ed.)*. Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia. Yayasan Obor Indonesia.

